



Judul : Perkuat Modal Sosial KPU dan Bawaslu
Tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Perkuat Modal Sosial KPU dan Bawaslu

Survei *Kompas* menunjukkan citra positif KPU dan Bawaslu di posisi ketiga dan keempat dari 12 lembaga yang disurvei. Kepercayaan publik menjadi modal sosial yang penting.

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki tahapan Pemilu 2024, persepsi positif publik terhadap Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu cenderung menguat. Capaian ini harus dijaga KPU dan Bawaslu dengan bekerja profesional, transparan, berintegritas, serta meningkatkan peran publik dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab, kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga berdampak pada kepercayaan serta proses dan hasil pemilu.

Survei Kepemimpinan Nasional (SKN) *Kompas* yang digelar berkala merekam citra 12 lembaga negara. Survei yang dilakukan 29 April hingga 10 Mei dengan melibatkan 1.200 responden menunjukkan citra Komisi Pemilihan Umum (KPU) di urutan ke-3 dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke-4. Adapun urutan pertama ditempati TNI dan urutan kedua pemerintah daerah.

Dalam survei kali ini, 67 persen responden menilai citra KPU baik, sedangkan 11 persen menjawab buruk dan 23 persen tidak tahu. Dalam survei Januari 2023, ada 62 persen responden menjawab baik. Sementara itu, untuk Bawaslu, pada survei Mei 2023, ada 65 persen responden menilai baik citra lembaga itu, 10 persen menilai buruk, serta 25 persen menjawab tidak tahu. Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Januari 2023 (62 persen).

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dihubungi Minggu (21/5/2023) mengatakan, peningkatan citra positif KPU disebabkan publik mulai menaruh perhatian ke pemilu. Sejak tahapan pemilu dimulai dan semakin hari kian mendekati tahun 2024, suasana pemilu semakin terasa. Selain menaruh perhatian pada kontesasi pemilu presiden dan pemilu legislatif, perhatian publik itu juga berkonsekuensi pada perhatian ke penyelenggara pemilu. Kerja-kerja KPU dalam melaksanakan tahapan dan jadwal pemilu disorot publik.

KPU, lanjutnya, juga mampu melaksanakan seluruh tahapan sesuai rencana. Dengan begitu, publik makin menyadari isu-nundaan pemilu makin tak re-

levan. Publik mendapat kepastian Pemilu 2024 dilaksanakan tepat waktu. "Ketepatan waktu dalam melaksanakan seluruh tahapan pemilu menjadikan kepercayaan publik kepada KPU meningkat," ujarnya.

Hasyim menuturkan, KPU berkomitmen melanjutkan penyelenggaraan pemilu yang akuntabel. Sebab, akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam menjalankan tahapan pemilu. Indikator yang bisa digunakan antara lain hasil survei dari lembaga survei ataupun media serta penghargaan keterbukaan dari lembaga lain.

Di sisi lain, KPU menepis isu-isu negatif yang tidak benar dalam penyelenggaraan pemilu. Salah satunya munculnya potongan video yang menyatakan seolah-olah hasil Pemilu 2024 sudah dirancang KPU untuk memenangkan tokoh dan partai tertentu. Pihaknya langsung memberi klarifikasi. "Sebagai penyelenggara pemilu, KPU terus menjaga kepercayaan publik. Kalau publik memercayai KPU, berarti kepercayaan kepada proses dan hasil pemilu juga muncul," kata Hasyim.

Anggota Bawaslu, Lolly Suenthy, mengatakan, citra Bawaslu yang terus meningkat menjadi modal kuat dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan tahapan pemilu. Capaian itu juga menjadi modal untuk berkolaborasi lebih luas bersama masyarakat dalam melakukan pencegahan melalui pengawasan partisipatif.

"Kami akan menjaga kepercayaan publik dengan berdiri tegak lurus pada regulasi dalam melakukan pengawasan agar proses ataupun hasil pemilu sesuai asas demokrasi yang kita jaga," kata Lolly.

Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengingatkan, untuk menjaga citra lembaga, pimpinan KPU dan Bawaslu juga harus bisa menjaga perilaku individu. Mereka harus sadar, independensi penyelenggara pemilu dipertaruhkan kepada pengisi jabatan tertinggi di lembaga itu. Jika individu mampu menjaga nilai-nilai profesionalitas, kredibel, berintegritas, mandiri, adil, dan taat terhadap

aturan, citra kelembagaan akan ikut meningkat.

Mantan Ketua KPU Arief Budiman berharap KPU dan Bawaslu menjaga kepercayaan dengan kerja-kerja profesional yang berintegritas, transparan, dan berkualitas agar citra baik terus meningkat. Penyelenggara pemilu harus memperhatikan dengan serius catatan dan masukan dari berbagai pihak untuk perbaikan dan menjamin terselenggaranya pemilu yang *free and fair*.

Ujian kemandirian

Dalam konferensi pers yang digelar Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan, Minggu, disuarakan agar KPU segera merevisi Pasal 8 Ayat (2) Peraturan KPU No 10/2023 tentang Pencalonan DPR dan DPRD agar sejalan dengan Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

"KPU harus konsisten melaksanakan apa yang diperintahkan konstitusi Pasal 22E UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang mandiri. Ini independensi KPU sekarang diuji. KPU harus lulus ujian, jangan sampai tidak lulus," kata Valina Singka Subekti, akademisi yang juga mantan anggota KPU. (SYA/ANA/DEA)